

Keluarga Kurang Mampu di Banda Aceh dan Pidie

Poor Families In Banda Aceh and Pidie

Daud Bahransyaf

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta

Jl. Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu Yogyakarta

Email: daudbram@gmail.com, HP. 081392703955

Diterima 27 September 2017, diperbaiki 10 Agustus 2017, disetujui 5 Desember 2017

Abstract

Based on the research conducted randomly to 600 heads of poor category families in five sub-districts (that of Syiah Kuala, Banda Raya, Lueng Bata, Ulle Kareng and Baiturrahman Sub-District) of Banda Aceh City, and also by identifying 599 people representing poor families in five sub-districts (that of Glumpang Tiga, Mutiara, Tiro/Truseb, Tangse and Muara Tiga Sub-District) of Pidie District, it was known that there were some socio-economic fundamental changes in their income and expenditure as well as ownership of the goods. Their income and expenditure of households level in both locations concerned had already achieved more than Rp.600.000,- per month. Goods which was previously used to be a secondary need and owned only by middle and upper class society, it had turned out to be primary need for life and their livelihood. Most people possessed mobile phones and motorcycles. Majority of respondents had each a TV of over 14" size and a refrigerator. Electricity for lighting had been utilized by most of the poor families in both two research sites. Electricity program had reached and been enjoyed by citizens in Banda Aceh City and by that of Pidie District. These empirical facts need to be observed and studied as an input to make adjustment on the aspects or criteria of families in poverty, either done by the related bodies or institutions, or by the authorities concerned in making Government Regulations or Local Government Regulations and Minister Regulations.

Keywords : *poverty; ownership; assets*

Abstrak

Berdasar pada penelitian yang dilakukan secara acak/random di Kota Banda Aceh pada lima kecamatan (Syiah Kuala, Bandar Raya, Lueng Bata, Ulle Kareng dan Kecamatan Baiturrahman) terhadap 600 kepala keluarga kategori miskin, dan Kabupaten Pidie pada lima kecamatan (Glumpang Tiga, Mutiara, Tiro/Truseb, Tangse dan Kecamatan Muara Tiga), dengan mendata 599 orang yang mewakili keluarga miskin, diketahui bahwa terdapat beberapa perubahan sosial ekonomi yang mendasar dalam penghasilan dan pengeluaran serta kepemilikan barang mereka. Penghasilan dan pengeluaran rumah tangga pada kedua lokasi dimaksud lebih dari Rp.600.000,- per bulan. Barang yang dahulu merupakan kebutuhan sekunder dan dimiliki oleh kalangan masyarakat menengah ke atas telah menjadi kebutuhan primer bagi kehidupan dan penghidupan mereka. Masyarakat memiliki HP dan sepeda motor. Sebagian besar responden memiliki TV ukuran diatas 14 " dan kulkas. Listrik sebagai alat penerangan sudah dimanfaatkan oleh sebagian besar responden keluarga miskin di kedua lokasi penelitian ini. Program listrik telah menjangkau dan dinikmati oleh warga masyarakat baik di Kota Banda Aceh maupun di Kabupaten Pidie. Fakta empirik tersebut perlu dicermati dan ditelaah sebagai bahan masukan untuk melakukan penyesuaian terhadap aspek atau kriteria keluarga kurang mampu, baik oleh instansi/lembaga terkait, oleh pihak berwenang dalam pembuatan Peraturan Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun Peraturan Menteri terkait.

Kata kunci : kemiskinan; kepemilikan; aset

A. Pendahuluan

Keberadaan keluarga kurang mampu di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai dengan tahun 2017 jumlahnya masih cukup besar. Berdasar data Biro Pusat Statistik (BPS), keluarga kurang mampu berjumlah 28,01 juta

atau 10,86 persen pada Maret 2016, berkurang dibanding September 2015 yang tercatat 28,51 juta orang atau 11,13 persen.

Menurut BPS pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiski-

nan) mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen), berkurang sebesar 0,50 juta orang dibanding dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2015 sebesar 8,22 persen, turun menjadi 7,79 persen pada Maret 2016. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 14,09 persen pada September 2015 menjadi 14,11 persen pada Maret 2016. Selama periode September 2015 sampai Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,28 juta orang (dari 10,62 juta orang pada September 2015 menjadi 10,34 juta orang pada Maret 2016), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 0,22 juta orang (dari 17,89 juta orang pada September 2015 menjadi 17,67 juta orang pada Maret 2016). Peran komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibanding peran komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2016 tercatat sebesar 73,50 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2015 yaitu sebesar 73,07 persen. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula pasir, mie instan, bawang merah dan roti. Komoditi bukan makanan yang besar pengaruhnya adalah biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Banda Aceh sering dianggap provinsi berprestasi rendah, kendati bermandikan rupiah berupa dana otonomi khusus dan pendapatan asli daerah yang nyaris mencapai 2 triliun rupiah, provinsi paling barat Indonesia ini masih mencatat 859 ribu penduduk miskin. Aceh juga tercatat sebagai provinsi ketujuh paling miskin di Indonesia versi Badan Pusat Statistik. Kota Banda Aceh adalah salah satu wilayah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh. Kota ini memiliki luas tidak terlalu besar yakni hanya

61,36 km² dengan batas daerah sebelah utara Selat Malaka, sebelah selatan Kabupaten Aceh Besar, sebelah timur Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat Samudera Indonesia. Kota Banda Aceh memiliki sembilan kecamatan, 17 mukim, 70 desa dan 20 kelurahan (gampong). Kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Kecamatan Ulee Kareng. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Syiah Kuala, dengan luas 14,24 km² dan kecamatan terkecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Jaya Baru yaitu 3,78 Km². Dari sembilan kecamatan tersebut, Kota Banda Aceh memiliki 90 gampong (20 kelurahan dan 70 desa), dan terbanyak berada di Kecamatan Meuraxa yakni memiliki 16 gampong, dan jumlah gampong terkecil berada di Kecamatan Kuta Raja ada 6 gampong.

Jarak kecamatan ke Ibu Kota Banda Aceh terjauh hanya lima km. Jangkauan wilayah kecamatan dengan kota provinsi relatif dekat, berarti pembinaan, pengawasan dan koordinasi kegiatan program pemerintah daerah dan lainnya juga relatif mudah penjangkauannya.

Berikut ini tentang Kabupaten Pidie, jumlah kecamatan di Kabupaten Pidie sebanyak 23, sedang jumlah gampong/desa secara keseluruhan terdiri atas 735 gampong/desa. Kecamatan yang memiliki gampong/desa terbanyak adalah Kecamatan Pidie dan Padang Tiji, sedang kecamatan yang memiliki gampong/desa paling sedikit adalah Kecamatan Gempang. Kabupaten Pidie memiliki 23 Kecamatan tersebar dari kecamatan yang terdekat sampai yang terjauh dengan kota Kabupaten Pidie. Di lokasi penelitian Kabupaten Pidie ada lima lokasi kecamatan terpilih dengan nama ibu kota dan jarak jangkauan sebagai berikut. Kecamatan Glumpang Tiga ibukotanya Glumpang Minyeuk, jarak jangkau ke kabupaten 17 km dan ke kota provinsi berjarak 220 km. Lokasi berikut Kecamatan Mutiara ibukotanya Beureunuen dengan jarak ke kabupaten sejauh 11 km dan ke provinsi 123 km. Kecamatan Tiro/Truseb ibukotanya adalah Tiro, dengan

jarak tempuh dari kabupaten sejauh 19 km dan 131 km dari Provinsi Aceh. Kecamatan Tangse ibukotanya Tangse, dengan jarak jangkau dari kabupaten sejauh 53 km dan ke provinsi sejauh 165 km. Kecamatan terakhir yakni Muara Tiga, ibukotanya Laweung, jarak ke Kabupaten Pidie sejauh 24 km dan ke Provinsi Aceh sejauh 98 km. Ditinjau dari letak lokasi terjauh dari Kota Kabupaten Pidie adalah Kecamatan Tangse. Jalan menuju kecamatan tersebut cukup baik beraspal, namun ada lokasi penelitian jalannya berada di sisi tebing atau gunung, dikhawatirkan terjadi longsor apabila turun hujan deras. Lokasi Banda Aceh dan Pidie memiliki daya jangkau yang berbeda satu dengan lain. Jangkauan lokasi penelitian terjauh terdapat di Kabupaten Pidie diperlukan waktu lebih lama untuk menuju lokasi penelitian ini, berbeda dengan lokasi penelitian di Kota Banda Aceh letaknya relatif berdekatan. Ditinjau dari korban tsunami tahun 2004, korban warga dan harta terbanyak berada di Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi keluarga kurang mampu di kedua lokasi dimaksud.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan (Istiana Hermawati dkk, 2015) yaitu penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*). Penggabungan beberapa metodologi ini menurut terminologi sebelumnya disebut '*triangulasi*'. *Triangulasi* oleh Denzin (1970) dikembangkan tidak sekedar penggabungan metode dan data saja, melainkan juga penggabungan para peneliti dan teori-teorinya. Denzin memandang bahwa penggabungan strategi penelitian sebagai cara mengkaji masalah penelitian yang sama akan memperkuat klaim yang menyangkut kesahihan kesimpulan yang dapat dicapai melalui data. Menurutnya, asumsi bahwa data diperoleh dari pendekatan yang diasumsikan berfokus pada masalah penelitian yang sama, konsisten dan terintegrasi dengan data yang lain. Sebaliknya, data yang berbeda tidak diharapkan konsisten tetapi data itu dipandang saling melengkapi.

Dalam konteks penelitian ini, kedua pendekatan digunakan dan diberikan kedudukan yang setara. Artinya, kedua metode digunakan secara simultan atau saling bertalian sejak masa survei lapangan, analisis data dan dalam penulisan laporan akhir. Pada saat survei lapangan, data ditekankan pada deskripsi obyektif dan penjelasan statistik tentang kondisi kemiskinan di lapangan. Data diperoleh dengan teknik observasi dan studi dokumenter sehingga diperoleh gambaran umum tentang masalah kemiskinan yang terjadi baik secara konseptual maupun empiris. Teknik ini didukung dengan daftar wawancara sehingga dapat digali informasi yang sangat spesifik. Melalui wawancara dapat dikumpulkan berbagai jenis data, yaitu data yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Kedua jenis data yang diperoleh kemudian dijadikan dasar untuk membangun model dan merumuskan hipotesa penelitian.

Dalam penelitian ini komponen kuantitatif dan kualitatif saling berproses dan memiliki bobot yang seimbang. Kedua pendekatan menuju pada pertanyaan-pertanyaan yang berbeda tetapi saling berhubungan sehingga kedua jenis data yang dihasilkan dapat saling melengkapi. Pendekatan *mixed method* yang peneliti gunakan, berupaya memadukan dua pendekatan dan data (kuantitatif dan kualitatif). Dengan memadukan pendekatan dan data, diharapkan dapat diperoleh data yang komprehensif.

Menentukan lokasi penelitian menurut Mo-leong (1990) mempertimbangkan teori substantif yaitu dengan pergi dan menjajagi lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian antara teori dengan kenyataan lapangan. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Sunyoto Usman (2015) menambahkan, bahwa pembahasan masalah kemiskinan harus memperhatikan *community setting* (lokasi). *Community setting* bisa dikategorikan berdasar wilayah, sektor dan modernitas. Kategori wilayah memperhatikan wilayah administratif (desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi), wilayah

geografis (misalnya *upland/low land* atau pesisir/pedalaman), dan wilayah demografis (misalnya padat penduduk dan jarang penduduk).

Community setting dengan kategori wilayah administrasi, yaitu dengan mengambil *setting* daerah perkotaan dan perdesaan. Dalam penelitian ini setiap provinsi diambil satu sampel daerah perkotaan dan perdesaan yaitu Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie sebagai representasi wilayah perkotaan dan perdesaan. Kota Banda Aceh ditetapkan lima kecamatan sebagai sampel penelitian yaitu Kecamatan Syiah Kuala, Bandar Raya, Lueng Bata, Ulle Kareng dan Kecamatan Baiturrahman. Kabupaten Pidie ditetapkan lima kecamatan sebagai sampel penelitian yaitu Kecamatan Glumpang Tiga, Mutiara, Tiro/Truseb, Tangse dan Kecamatan Muara Tiga. Berdasar penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang kemiskinan yang lebih komprehensif, dalam skope lokal dan atau regional.

Populasi penelitian adalah seluruh keluarga fakir miskin yang teregister (penerima layanan program pemerintah seperti Raskin, Kartu Indonesia Sejahtera/KIS, Kartu Indonesia Sehat/KIS, Kartu Indonesia Pintar/KIP, Jamkesda) dan yang tidak teregister. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *Multi Stage Cluster Random Sampling* (ditentukan lima kecamatan sebagai sampel penelitian). Setiap kecamatan dilibatkan enam petugas pengumpul data dan masing-masing petugas akan mengumpulkan data dengan melibatkan 20 responden (keluarga miskin), dengan catatan 18 orang adalah responden yang teregister dan dua responden yang tidak teregister. Berdasar perhitungan tersebut, di Kota Banda Aceh ditetapkan 600 responden dan di Kabupaten Pidie 599 responden. Dari 600 responden terdiri dari 540 responden teregister dan 60 responden tidak teregister per lokasi. Sampel penelitian (responden) ditentukan secara acak/random. Data dan informasi yang terkumpul melalui angket akan diolah dan dianalisis secara kuantitatif (persentase) dan kualitatif untuk dinarasikan berdasarkan ragangan yang telah dibuat.

Kajian tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan di dua lokasi penelitian yakni di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie, ternyata sepaham dengan pandangan Andre Harsono (VOA 2016), seorang peneliti dari *Human Right Watch* kepada VOA menilai perubahan besar di Aceh 10 tahun setelah peristiwa tsunami, masih menyisakan pekerjaan rumah berupa kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Infrastruktur di Aceh bagus sekali, jalan, jembatan, kota bahkan taman-taman berkembang dengan baik, airport bagus. Dari segi kemiskinan Provinsi Aceh merupakan salah satu yang termiskin di Indonesia, ranking ke enam sehingga cukup menyedihkan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho (29 Desember 2016), menyatakan sebagian besar bencana alam tahun ini, terjadi di lokasi rawan bencana yang menjadi tempat tinggal masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Akibat 2.342 bencana yang terjadi di Indonesia pada 2016, diperkirakan dampak ekonomi terjadi beragam peristiwa yang mencapai Rp. 4,96 triliun. Ia mengatakan, dampak ekonomi bencana tahun ini lebih rendah dibandingkan 2015, meski jumlah peristiwa tahun ini lebih banyak.

Dampak ekonomi besar akibat bencana antara lain terjadi pada peristiwa banjir bandang di Garut, Jawa Barat, yang mencapai Rp 295,8 miliar. Gempa bumi di Pidie Jaya, Pidie, dan Bireun, Aceh, mencapai Rp 2,94 triliun. Banjir di Bima Rp1,04 triliun, banjir di Pangkal Pinang Rp 94 miliar, banjir Bengawan Solo meliputi Bojonegoro, Tuban, Lamongan, hingga Gresik sekitar Rp100 miliar. Hal ini membuat jumlah keluarga miskin meningkat, akibat mereka gagal panen, kehilangan aset produksi, dan terganggu kehidupan sehari-hari. Penyakit pun bermunculan, utang meningkat, kehidupan para keluarga miskin menjadi lebih sengsara karena mengalami proses pendalaman kemiskinan.

Ada kaitan sangat signifikan antara bencana, pembangunan, dan kemiskinan. Bencana dapat

langsung menyebabkan masyarakat jatuh miskin. Masyarakat yang miskin menjadi lebih miskin. Keluarga miskin yang setiap tahun selalu terkena bencana, akan kesulitan untuk memulihkan kembali kondisi ekonomi mereka. Sebab, sebelum mereka bisa pulih sudah kembali terkena bencana. Sutopo ingin masalah bencana menjadi perhatian bersama semua pihak. Tujuannya agar bisa mengupayakan langkah pencegahan, demi mengurangi dampak banjir terhadap masyarakat.

Pandangan berikut dari Muslahuddin Daud (dalam Ranny Virginia Utami CNN Indonesia, 2014), pengamat pembangunan Aceh, menyatakan pembangunan di Aceh pasca tsunami secara fisik memang bagus, namun pembangunan tersebut dirasa sia-sia karena tidak diselaraskan dengan pembangunan reguler. Muslahuddin menilai ada beberapa faktor yang membuat pembangunan di Aceh dinilai tidak maksimal dan hanya bagus secara fisik. Dia menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan pembangunan di Aceh dinilai tidak maksimal dan hanya bagus secara fisik.

Faktor pertama, menurut Muslahuddin, adalah segi dana yang masuk untuk pembangunan Aceh sebesar Rp. 80 triliun, sementara yang dibutuhkan untuk proyek rekonstruksi pasca bencana hanya Rp. 50 triliun. Jumlah dana lebih besar ini membuat pembangunan di Aceh menjadi sangat bagus, namun hanya secara fisik, misalnya pembangunan jalan, perumahan, pelabuhan dan perbaikan bandara.

Faktor kedua masalah penyerahan aset yang sudah dibangun dan diperbaiki oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh Nias. BRR Aceh-Nias adalah badan khusus yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bergerak menjadi 'pusat' keluar masuk dana berbagai pihak. Dana berasal dari APBN dan lembaga donor baik multilateral dan bilateral, Palang Merah Indonesia, internasional maupun negara lain, termasuk dari dunia usaha. Total 900 lembaga dengan dana sekitar US\$ 7,2 miliar dua per tiga bantuan dari luar negeri. Setelah

lebih dari lima tahun berdiri tahun 2009 BRR menyelesaikan tugas. Dari alokasi dana sekitar US\$6,7 juta, setidaknya telah terbangun lebih 140.000 rumah, 1.759 sekolah, 363 jembatan dan 13 airport.

Menurut pandangan Muslahuddin Daud, sejumlah aset tersebut tidak dirawat pemerintah lokal. "Pertanyaannya, siapa yang merawat? Tidak ada perawatan dan akhirnya tidak berfungsi dengan baik. Kondisi tersebut tidak selaras dengan pembangunan reguler, sebagai contoh program dari UNDP sudah dibangun tempat pembuangan sampah air tetapi tidak dipakai.

Muslahuddin juga menyoroti iklim investasi di Aceh yang dinilai kurang bersahabat karena permasalahan stabilitas daerah. Aksi kekerasan dan mentalitas keberpihakan oleh pejabat daerah setempat kerap menghambat masuknya investasi di Aceh. "Siapa yang masuk ke Aceh harus bayar ke beberapa pihak," ujar Muslahuddin. "Ada 170 kesepakatan investasi yang saya ketahui masuk ke Aceh namun gagal, hanya tiga atau empat yang berhasil," ujar Muslahuddin menambahkan. Ada ketidaksinambungan antara rekonstruksi pasca tsunami dengan pembangunan normal di Aceh. Rekonstruksi tidak mendorong perekonomian di Aceh. Para pebisnis tidak melihat Aceh sebagai peluang yang menarik karena mereka belum melihat adanya stabilitas di Aceh. Aceh masih mengimpor ekonomi, barang keluar aceh jumlahnya tidak signifikan. Ada beberapa hal yang dipandang berkontribusi dalam masalah ini. Selama lima tahun belakangan, warga Aceh termanjakan dengan bantuan. Kondisi inipun berlaku di level pemerintah yang nyatanya tidak berfungsi sebagai fasilitator. Ia bahkan menuturkan, investasi kurang maju di Aceh ada hubungannya dengan penerapan hukum syariah di sana. Para pengusaha besar berpikir ulang untuk masuk ke Aceh karena banyaknya batasan dalam hukum syariah. Rekonstruksi tak terlalu mendorong perekonomian di Aceh. Para pebisnis tak melihat Aceh sebagai peluang yang menarik karena mereka belum melihat adanya stabilitas di Aceh.

Pandangan Kuntoro (dalam Nurina Savitri, 2014), anggaran 7,2 milyar dolar, BRR (pimpinan Profesor Kuntoro) telah menjalankan salah satu program kemanusiaan terbesar dalam sejarah. Anggaran besar itu ternyata dinilai tak mampu mendongkrak perekonomian Aceh. “Belum ada investasi besar di Aceh yang masuk. Belum ada kebun baru, pertambangan baru,” ujar Profesor Kuntoro. Aceh masih mengimpor barang dari luar Aceh jumlahnya tidak signifikan. Berbicara dalam sebuah forum jurnalis asing di Jakarta beliau mengungkapkan salah satu penyesalan ketika purna tugas dari BRR. Beliau menyesalkan sistem yang sudah dibangun di Aceh tidak lagi digunakan. Masyarakat kurang diberi pemahaman terhadap sistem yang bisa membantu mereka untuk berkembang lebih jauh.

Pembangunan ekonomi yang berjalan lambat di Aceh justru berpangkal dari program pemulihan pasca bencana itu sendiri. Di Aceh yang terjadi adalah sebuah proses normal pasca konflik berdarah. Paling tidak dibutuhkan waktu 10 tahun untuk mereka belajar memerintah dengan baik. Profesor ini pun menimpali, apa yang terjadi di Aceh adalah sebuah proses normal pasca konflik berdarah, dibutuhkan waktu 10 tahun untuk belajar memerintah dengan baik. Kuntoro dan Muslahuddin mencontohkan sektor pariwisata sebagai bidang yang paling terdampak akibat penerapan hukum syariah. Potensi konflik berdarah seperti era sebelum perdamaian, diperkirakan tidak akan kembali menghantui Tanah Rencong.

Pandangan Sydney Jones (Direktur Institut Analisa Kebijakan Konflik) seorang peneliti terorisme di Asia Tenggara pada forum ‘10 Tahun Tsunami’ menyampaikan, “Kemungkinan untuk kembali ke situasi konflik sangat kecil, karena kelompok GAM sangat mahir memainkan peran mereka dalam politik Aceh. Setidaknya saya tak melihat adanya potensi konflik dalam jangka pendek dan menengah.”

Provinsi NAD memiliki otonomi khusus untuk melaksanakan syariat Islam yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Otonomi tersebut mencakup ketentuan pelaksanaan syariat Islam yang kemudian secara khusus diatur dengan Qanun Aceh.

Kota Banda Aceh pasca tsunami tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 sudah memiliki kemajuan yang sangat pesat dari segala aspek. Berdasar pengamatan parsial yang ‘penulis’ lakukan beberapa waktu yang lalu (bulan November dan Desember 2015 lalu), di Kota Banda Aceh sudah dilengkapi sarana, prasarana dan infrastruktur, baik secara sosial, ekonomi maupun teknologi. Ketersediaan kebutuhan primer dan sekunder secara sosial, ekonomi dan teknologi sudah terpenuhi. Salah satu yang menarik sudah tersedia jaringan internet dan terjangkau dari segala penjuru sudut kota, bahkan hampir semua warung kopi dan warung mie Aceh menyediakan *wifi*. Warga masyarakat di Kota Banda Aceh memiliki *laptop*, HP android dan sejenisnya sehingga dapat menikmati jendela informasi secara nasional dan internasional.

C. Kondisi Keluarga Kurang Mampu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasar jenis kelamin, di Kota Banda Aceh laki-laki berjumlah 447 orang (74.50 persen) perempuan ada 153 orang (25.50 persen), di Kabupaten Pidie, laki-laki ada 445 orang (74.29 persen) dan perempuan ada 154 orang (25.71 persen). Ditinjau dari status perkawinan secara berurut di Kota Banda Aceh, kawin 430 orang (71.67 persen), cerai mati 121 orang (20.17 persen), cerai hidup 34 orang (5.67 persen), dan belum kawin ada lima orang (2.50 persen). Di Kabupaten Pidie, status kawin ada 439 orang (73.29 persen), cerai mati 104 orang (17.36 persen), cerai hidup ada 7.35 persen dan belum kawin ada 12 orang (2.00 persen) saja. Dari data tersebut diketahui bahwa hampir tidak ada perbedaan diantara kedua lokasi penelitian, dimana responden laki-laki lebih dominan jumlahnya dan 70 persen lebih berstatus kawin.

Pendidikan terakhir yang ditamatkan, responden di Kota Banda Aceh, yang menamatkan SMA/SMK/MA/ sederajat terdapat 235 orang (39.17 persen), untuk SMP/MTs/ Sederajat ada 131 orang (21.83 persen), dan SD/MI/ Sederajat ada 138 orang (23.00 persen), sedangkan di Kabupaten Pidie yang menamatkan SD/MI/ Sederajat 227 orang (37.90 persen) jumlahnya terbesar, disusul berikutnya tamat SMP/MTs/ Sederajat ada 138 orang (23.04 persen) dan tamat

SMA/SMK/MA/ Sederajat sebesar 75 orang (12.52 persen). Dari tampilan data diketahui bahwa responden di Kota Banda Aceh berpendidikan SLTA dan sejenisnya serta SLTP sejenis terbanyak ditamatkan oleh responden, sedang di Kabupaten Pidie terbanyak responden menamatkan pendidikan SD dan sejenisnya serta SLTP dan sejenisnya. Artinya dari sektor pendidikan kondisinya lebih baik di Kota Banda Aceh, bisa dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan

No	Pendidikan Terakhir	Banda Aceh		Pidie	
		f	%	f	%
1	Tidak Sekolah	26	4.33	60	10.02
2	Belum/Tidak Tamat SD/Sederajat	60	10.00	97	16.19
3	SD/MI/Sederajat	138	23.00	227	37.90
4	SMP/MTs/Sederajat	131	21.83	138	23.04
5	SMA/SMK/MA/Sederajat	235	39.17	75	12.52
6	Diploma I/II	1	0.17	1	0.17
7	Diploma III/Sarjana Muda	5	0.83	0	0.00
8	Diploma IV/S1	3	0.50	1	0.17
9	S2/S3	1	0.17	0	0.00
Jumlah		600	100.00	599	100.00

Sumber Data : Data Primer 2015; N : 1.199

Kategori umur responden di kedua lokasi penelitian cukup variatif. Kategori umur terbesar berada pada rentang 40 – 49 tahun (Banda Aceh 210 orang atau 35.00 persen dan Kabupaten Pidie 237 orang atau 39.57 persen) dan urutan berikut pada umur 50 – 59 tahun (Banda Aceh 153 orang atau 25.50 persen dan Kabupaten Pidie 167 orang atau 27.88 persen), selanjutnya umur 30 – 39 tahun (Banda Aceh 146 orang atau 24.33 persen dan Kabupaten Pidie 121 orang atau 20.20 persen). Responden lain berusia antara 20 -29 tahun (Banda Aceh 6 orang atau 1.00 persen dan Kabupaten Pidie 11 orang atau 1.84 persen) dan umur >60 tahun (Banda Aceh 85 orang atau 14.17 persen dan Kabupaten Pidie 63 orang atau 10.52 persen). Dari data tersebut diketahui bahwa responden di kedua lokasi terbesar dengan kategori umur 40 – 49 tahun, diikuti kategori umur 50 – 59 tahun.

Pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan yang dilakoni responden di kedua lokasi pe-

nelitian terlihat sangat variatif sekali. Di Kota Banda Aceh pekerjaan utama, terbesar adalah buruh tidak tetap non pertanian yakni 195 orang (32.50 persen), disusul berikutnya usaha sendiri yakni 140 responden (23.33 persen), dan usaha dengan buruh tetap/tidak tetap ada 61 orang (10.17 persen). Pekerjaan sampingan di Kota Banda Aceh diketahui sebagian besar tidak bekerja yaitu 499 orang (83.17 persen). Di Kabupaten Pidie untuk pekerjaan utama terbanyak buruh pertanian tidak tetap ada 379 orang (63.27 persen) dan buruh tidak tetap non pertanian sebesar 111 orang (18.53 persen). Pekerjaan sampingan diketahui terbesar tidak bekerja yakni 379 orang (63.27 persen). Memiliki pekerjaan sampingan di Kabupaten Pidie adalah buruh pertanian tidak tetap diisi oleh 93 orang (15.53 persen) dan buruh tidak tetap non pertanian 65 orang (10.85 persen), dan pekerjaan sampingan lain 24 orang (4.01 persen). Tampilan data yang ada diketahui bahwa pada kedua lokasi penelitian

ini, pekerjaan utama terbesar sebagai buruh tidak tetap non pertanian, usaha sendiri (Kota Banda Aceh), buruh pertanian tidak tetap dan buruh tidak tetap nonpertanian (Kabupaten Pidie). Pekerjaan sampingan di Kota Banda Aceh ham-

pir semua responden menyatakan tidak memiliki pekerjaan sampingan dan di Kabupaten Pidie (63.27 persen) mengaku tidak memiliki (tidak bekerja) pekerjaan sampingan. Secara lengkap data tersaji pada tabel 2.

Tabel 2. Jenis Pekerjaan Utama dan Sampingan

No	Jenis Pekerjaan	Banda Aceh				Kabupaten Pidie			
		Utama		Sampingan		Utama		Sampingan	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Usaha Sendiri	140	23.33	42	7.00	15	2.50	5	0.83
2	Usaha degan buruh tetap/tidak tetap	61	10.17	8	1.33	21	3.51	30	5.01
3	Buruh/Karyawan/Pegawai tetap	43	7.17	9	1.50	9	1.50	3	0.50
4	Buruh Pertanian tidak Tetap	9	1.50	1	0.17	379	63.27	93	15.53
5	Buruh tidak tetap non Pertanian	195	32.50	20	3.33	111	18.53	65	10.85
6	Pensiun	4	0.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	Tidak Bekerja	86	14.33	499	83.17	42	7.01	379	63.27
8	Lainnya	62	10.33	21	3.50	22	3.67	24	4.01
Jumlah		600	100.00	600	100.00	599	100.00	599	100.00

Sumber Data : Data primer 2015; N: 1.199

Penghasilan keluarga perbulan di kedua lokasi penelitian terlihat ada perbedaan akan penerimaan yang diperoleh oleh responden. Responden di Kota Banda Aceh terbesar menerima penghasilan antara Rp.1.201.000 sampai Rp. 1.800.000,- per bulan yakni 192 orang (32.00 persen). Responden di Kabupaten Pidie terbesar yakni 214 orang (35.73 persen) menerima penghasilan antara Rp.601.000 sampai Rp. 1.200.000,- per bulan. Berikutnya, 143 orang (23.83 persen) responden di Kota Banda Aceh berpenghasilan antara Rp.601.000 sampai Rp.1.200.000,- dan di Kabupaten Pidie ada 154 orang (25.71 persen) berpenghasilan antara

1.201.000 sampai Rp.1.800.000,- Ada puluhan orang di kedua lokasi yang berpenghasilan lebih dari Rp.3.001.000,- (9.17 persen di Banda Aceh dan 4.67 persen di Kabupaten Pidie) dan juga dibawah atau sama dengan Rp.600.000,- (Banda Aceh 1.83 persen dan Kabupaten Pidie 8.51 persen).

Perbedaan penerimaan penghasilan tersebut memang wajar, karena lokasi responden bermukim dan bekerja/berusaha di perkotaan, sedang lainnya di daerah perdesaan, sehingga secara normatif tampak ada perbedaan penghasilan yang diterima. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Penghasilan Keluarga per Bulan

No	Penghasilan Keluarga/Bulan	Banda Aceh		Pidie	
		f	%	f	%
1	< Rp.600.000,-	11	1.83	51	8.51
2	Rp.601.000 – Rp.1.200.000,-	143	23.83	214	35.73
3	Rp.1.201.000 – Rp.1.800.000,-	192	32.00	154	25.71
4	Rp.1.801.000 – Rp.2.400.000,-	128	21.33	114	19.03
5	Rp.2.401.000 – Rp.3.000.000,-	71	11.83	38	6.34
6	>Rp.3.001.000,-	55	9.17	28	4.67
Jumlah		600	100.00	599	100.00

Sumber Data : Data Primer 2015; N : 1.199

Data selanjutnya adalah mengenai pengeluaran keluarga responden perbulan baik di Kota Banda Aceh maupun di Kabupaten Pidie. Dari data yang ada diketahui bahwa pengeluaran keluarga per bulan responden di Kota Banda Aceh hampir sama jumlahnya yakni untuk konsumsi antara Rp.601.000,- sampai 1.200.000,- yakni 272 orang (45.33 persen) dan Rp. 1.210.000,- sampai Rp.1.800.000,- yakni 214 orang (35.67 persen). Ada juga responden yang pengeluaran antara Rp.1.801.000,- sampai Rp.2.400.000,- yaitu 114 orang (19.00 persen). Pengeluaran non konsumsi terbesar antara Rp.601.000,- sampai Rp.1.200.000,- yaitu 428 orang (71.33 persen).

Pengeluaran responden di Kabupaten Pidie terbesar pada pengeluaran antara Rp.601.000,- sampai Rp.1.200.000,- yakni 431 orang (71.95

persen), dan untuk pengeluaran non konsumsi hampir sama jumlahnya antara pengeluaran Rp. 1.801.000,- sampai Rp.2.400.000,- yaitu 214 orang (35.73 persen) dan pengeluaran antara Rp.1.201.000,- sampai Rp.1.800.000,- yaitu 210 orang (35.06 persen). Namun demikian untuk pengeluaran non konsumsi >Rp.3.000.000,- juga ada sebesar 68 orang (11.35 persen). Perbedaan pengeluaran ini karena perbedaan domisili responden, ada yang bertempat tinggal di daerah perkotaan, dan ada responden yang bermukim di daerah perdesaan, sehingga secara wajar terdapat perbedaan pengeluaran untuk kebutuhan hidup responden dan keluarganya. Gambaran pengeluaran keluarga per bulan ini dapat diketahui pada tabel 4.

Tabel 4. Pengeluaran Keluarga per Bulan

No	Pengeluaran Keluarga/ Bulan	Banda Aceh				Kabupaten Pidie			
		Konsumsi		Non Konsumsi		Konsumsi		Non Konsumsi	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	<Rp.600.000,-	0	0.00	7	1.17	0	0.00	0	0.00
2	Rp.601.000 – Rp.1.200.000,-	272	45.67	428	71.33	431	71.95	6	1.00
3	Rp.1.201.000 – Rp.1.800.000,-	214	35.67	136	22.67	163	27.21	210	35.06
4	Rp.1.801.000 – Rp.2.400.000,-	114	19.00	24	4.00	2	0.33	214	35.73
5	Rp.2.401.000 – Rp.3.000.000,-	0	0.00	2	0.33	3	0.50	101	16.86
6	> Rp.3.000.000,-	0	0.00	3	0.50	0	0.00	68	11.35
Jumlah		600	100.00	600	100.00	599	100.00	599	100.00

Sumber Data : Data Primer 2015; N : 1.199

Status kepemilikan rumah di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie, sebagian besar merupakan milik sendiri. Kondisi ini ditunjukkan responden di Kota Banda Aceh ada sebesar 423 orang (70.50 persen), dan lebih besar jumlahnya dari kepemilikan rumah di Kabupaten Pidie yakni 483 orang (80.63 persen). Status kepemilikan lain adalah kontak/sewa dan bebas

sewa/menumpang. Kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa kebanyakan dari responden telah memiliki rumah sendiri yang digunakan bersama dengan keluarga.

Responden di kedua lokasi bebas sewa/menumpang dengan keluarga besar. Data ini dapat diperhatikan pada tabel 5.

Tabel 5. Status Kepemilikan Rumah

No	Status Kepemilikan	Banda Aceh		Pidie	
		f	%	f	%
1	Milik Sendiri	423	70.50	483	80.63
2	Kontrak/Sewa	64	10.67	13	2.17
3	Bebas Sewa/Menumpang	111	18.50	103	17.20
4	Rumah Dinas	0	0.00	0	0.00
5	Lainnya	2	0.33	0	0.00
Jumlah		600	100.00	599	100.00

Sumber Data : Data Primer 2015; N : 1.199

Jenis lantai rumah terluas yang ditempati baik di Kota Banda Aceh maupun Kabupaten Pidie, lebih dari 500 (lima ratus) responden berlantai semen/papan/kayu berkualitas rendah/bambu (504 orang atau 84.00 persen di Banda Aceh, 523 orang atau 87.31 persen di Kabupaten Pidie). Sisanya berlantai tegel/keramik/marmer/kayu berkualitas tinggi dan berlantai tanah.

Data terkait atap rumah terluas yang digunakan oleh responden di kedua lokasi penelitian, terbesar atap berupa seng/asbes, 586 orang atau 97.67 persen digunakan responden di Kota Banda Aceh dan 441 orang atau 73.62 persen digunakan responden di Kabupaten Pidie. Jenis atap lain hanya sedikit yang menggunakan (beton/genteng/sirap) dan ijuk/rumbia. Kecuali di Kabupaten Pidie atap ijuk/rumbia digunakan oleh 155 orang (25.88 persen).

Jenis dinding terluas yang digunakan responden di kedua lokasi terbanyak adalah tembok tanpa plester/kayu berkualitas rendah/seng (392 orang atau 65.33 persen di Banda Aceh dan 519 orang atau 86.64 persen di Kabupaten Pidie). Rumah dengan dinding tembok di plester/kayu berkualitas tinggi khusus di Kota Banda Aceh cukup banyak, yakni 168 orang atau 28.00 persen, sedangkan di Kabupaten Pidie relatif sedikit yakni hanya 23 orang atau 3.84 persen. Rumah dengan jenis dinding bambu dan lainnya relatif sedikit yang menggunakan di kedua lokasi ini.

Jenis lantai, jenis atap yang digunakan dan jenis dinding baik di Kota Banda Aceh maupun di Kabupaten Pidie terlihat sama pemanfaatannya. Kondisinya dikarenakan perekonomian

responden di kedua lokasi hampir sama (seperti yang termaktub dalam beberapa tabel diatas), hanya sebagian saja responden di Kota Banda Aceh kondisinya lebih bagus karena mereka dapat bantuan perbaikan rumah dari pemerintah atau non pemerintah pasca bencana beberapa waktu yang lalu.

Berikutnya adalah sumber penerangan utama yang dimanfaatkan oleh responden di kedua lokasi baik apakah itu di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie. Dari data yang diperoleh bahwa sebagian besar responden telah menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama. 580 orang atau 96.67 persen di Kota Banda Aceh dan 557 orang atau 92.99 persen di Kabupaten Pidie. Sebagian kecil saja responden yang memanfaatkan listrik non PLN dan lampu minyak sebagai sumber penerangan utama. Kondisi ini menggambarkan bahwa listrik PLN telah digunakan oleh sebagian besar responden sebagai sarana penerangan dan sarana lain yang memanfaatkan listrik.

Sumber air yang dimanfaatkan oleh responden di kedua lokasi penelitian terbesar menggunakan sumur yakni 427 orang atau 71.17 persen di Banda Aceh dan 516 orang atau 86.14 persen di Kabupaten Pidie. Khusus di kota Banda Aceh cukup banyak yang menggunakan ledeng sebagai sumber air (165 orang atau 27.50 persen). Sumber air lain seperti air hujan/air sungai dan lainnya baik di Banda Aceh maupun di Pidie jumlahnya sedikit. Kondisi ini menginformasikan bahwa sumber air dari sumur masih banyak digunakan oleh responden dan keluarga sebagai kebutuhan air bersih sehari-hari.

Sumber air minum yang dimanfaatkan responden di kedua lokasi sangat variatif jumlahnya. Kota Banda Aceh terbanyak menggunakan air kemasan sebagai sumber air minum (277 orang atau 46.17 persen), sedang di Kabupaten Pidie terbanyak menggunakan sumur sebagai sumber air minum (492 orang atau 82.14 persen). Terdapat perbedaan dalam penggunaan sumber

air minum di kedua lokasi penelitian ini. Hal ini menunjukkan tentang pemanfaatannya, dan kemungkinan juga sumber air yang ada (khusus di Kota Banda Aceh kurang layak diminum karena mengandung zat tertentu atau lokasi rumah mereka dekat dengan laut). Secara lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Status Kepemilikan Rumah

No.	Sumber Air Minum	Banda Aceh		Kabupaten Pidie	
		f	%	f	%
1	Kemasan	277	46.17	22	3.67
2	Ledeng	78	13.00	50	8.35
3	Sumur	69	11.50	492	82.14
4	Air Hujan/Sungai	0	0.00	23	3.84
5	Lainnya	176	29.33	12	2.00
Jumlah		600	100.00	599	100.00

Sumber Data : Data Primer 2015; N : 1.199

Bahan bakar utama yang digunakan khusus untuk Kota Banda Aceh hampir seluruh responden yaitu 523 orang (87.17 persen) menggunakan listrik/gas (dalam hal ini hasil pengamatan peneliti di lapangan, responden menggunakan gas sebagai bahan bakar utama). Di Kabupaten Pidie hanya 337 orang atau 56.26 persen saja yang menggunakan listrik/gas, terbesar kedua mereka menggunakan kayu/arang sebagai bahan bakar utamanya. Sisanya di kedua lokasi menggunakan minyak tanah dan lain sebagai bahan bakar utama.

Fasilitas MCK yang digunakan khusus untuk Kota Banda Aceh, hampir seluruh responden 516 orang (86.00 persen) merupakan milik sendiri. Di

Kabupaten Pidie fasilitas MCK sangat variatif, terbesar 219 orang (36.56 persen) merupakan fasilitas MCK umum, 116 orang (19.37 persen) fasilitas MCK nya milik sendiri dan 108 orang (18.03 persen) fasilitas MCK bersama. Jumlah responden di Kabupaten Pidie cukup besar yang tidak punya fasilitas MCK yaitu ada 156 orang (24.04 persen).

Kondisi tempat tinggal keluarga kurang mampu di kedua lokasi ini bertumpu pada kondisi sedang, yakni 374 orang (62.33 persen) di Kota Banda Aceh dan 426 orang (71.12 persen) di Kabupaten Pidie. Responden lain tersebar pada kondisi tempat tinggal baik dan rusak. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel 7.

Tabel 7. Kondisi Tempat Tinggal

No	Kondisi Tempat Tinggal	Banda Aceh		Kabupaten Pidie	
		f	%	f	%
1	Baik	121	20.17	17	2.84
2	Sedang	374	62.33	426	72.12
3	Rusak	105	17.50	156	26.04
Jumlah		600	100.00	599	100.00

Sumber Data : Data Primer 2015; N : 1.199

Data berikut pada tabel 8 menyajikan tentang kepemilikan aset baik responden di Kota Banda Aceh maupun di Kabupaten Pidie. Dari data yang terkumpul menunjukkan responden di Kota Banda Aceh yang memiliki HP cukup besar jumlahnya (487 orang atau 81.17 persen), sepeda motor (445 orang atau 74.17 persen), lemari es (396 orang atau 66.00 persen) dan TV>21” (316 orang atau 52.67 persen). Kepemilikan aset di

Kabupaten Pidie sebarannya hampir sama dengan Kota Banda Aceh. Dari data yang terkumpul kepemilikan sepeda motor dimiliki oleh 275 orang (45.91 persen), kemudian HP dimiliki oleh 198 orang (33.06 persen), sepeda oleh 160 orang (26.71 persen) dan ternak dimiliki oleh 153 orang (25.54 persen) serta kepemilikan TV>21” dimiliki oleh 135 orang (22.54 persen).

Tabel 8. Kepemilikan Aset

No	Kepemilikan Aset	Banda Aceh		Kabupaten Pidie	
		f	%	f	%
1	Tanah/Sawah/Kebun/Tambak	37	6.17	141	23.50
2	Perhiasan	54	9.00	14	2.34
3	Tabungan	64	10.67	27	4.51
4	Ternak	77	12.83	153	25.54
5	Perahu Motor	0	0.00	2	0.33
6	Sepeda Motor	445	74.17	275	45.91
7	Tempat usaha	51	8.50	23	3.84
8	Sepeda	138	23.00	160	26.71
9	Perahu /Sampan	8	1.33	2	0.33
10	Lemari Es	396	66.00	47	7.85
11	Mesin Cuci	40	6.67	0	0.00
12	TV > 21”	316	52.67	135	22.54
13	HP	487	81.17	198	33.06
14	Lainnya	6	1.00	4	0.67
Jumlah		600	100.00	599	100.00

Sumber Data : Data Primer 2015; N : 1.199

Data diatas menjelaskan tentang kondisi dan keberadaan responden keluarga kurang mampu terhadap kehidupan dan penghidupannya di masyarakat, baik responden di Kota Banda Aceh maupun responden di Kabupaten Pidie. Terjadi pergeseran tentang asumsi keluarga kurang mampu di Aceh terhadap kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada kepemilikan aset responden, sepeda motor, HP dan TV >21” ternyata dimiliki oleh keluarga kurang mampu di kedua lokasi penelitian ini. Artinya sudah ada pergeseran tentang persepsi terhadap kepemilikan barang bukan menjadi kebutuhan sekunder tetapi sudah mengarah pada kebutuhan primer yang responden gunakan sehari-hari bersama keluarga.

Faktor keluarga kurang mampu di kedua lokasi penelitian dilihat dari penghasilan responden yang diterima setiap bulan baik dari hasil usaha

maupun lain, yang berubah secara signifikan sesuai peraturan yang dibuat pemerintah. Jumlah penghasilan yang mereka terima baik di Kota Banda Aceh maupun Kabupaten Pidie antara Rp.1.200.000.- sampai dengan Rp. 2.400.000,- per bulan. Pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga responden di Kota Banda Aceh antara Rp.1.200.000.- sampai dengan Rp.2.400.000,- dan sedikit berbeda dengan responden di Kabupaten Pidie yakni Rp.1.200.000,- sampai dengan Rp.1.800.000,- per bulan.

Berdasarkan data yang tersaji kiranya perlu ada pemikiran yang komprehensif akan perubahan persepsi tentang keluarga kurang mampu atau keluarga miskin khususnya di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie terhadap kepemilikan barang dan penghasilan serta pengeluaran per bulan.

D. Penutup

Berdasar uraian analisa dan interpretasi data yang tersaji dapat disimpulkan bahwa di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie masih terdapat warga masyarakat yang hidup kekurangan atau keluarga kurang mampu. Khusus di Kota Banda Aceh cukup besar responden dan keluarga yang memperoleh bantuan perbaikan rumah dari pemerintah, NGO, masyarakat peduli keluarga korban gempa dan tsunami. Khusus untuk kota kriteria kemiskinan ditinjau dari rumah, tidak serta merta dapat mengkategorikannya. Diperlukan pengamatan lapangan untuk dapat menentukan keluarga miskin di daerah ini.

Ditinjau dari penghasilan kepala keluarga per bulan ditemukan datanya jauh diatas penghasilan keluarga miskin yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp. 600.000,-/bulan. Pada umumnya atau sebagian besar penghasilan responden baik di Kota Banda Aceh maupun Kabupaten Pidie antara Rp.1.200.000.- sampai dengan Rp. 2.400.000,- per bulan. Pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga responden di Kota Banda Aceh antara Rp.1.200.000.- sampai dengan Rp.2.400.000,- dan sedikit berbeda dengan responden di Kabupaten Pidie yakni Rp.1.200.000,- sampai dengan Rp.1.800.000,- per bulan.

Kepemilikan barang yang beberapa tahun terdahulu merupakan barang sekunder dan tergolong mewah/mahal, di kedua lokasi penelitian ini barang tersebut sudah merupakan kebutuhan primer dan menjadi keperluan atau kebutuhan keseharian. Barang yang dimaksud adalah HP, sepeda motor, TV diatas 14 inci dan kulkas. Harga dan kondisi barang dimaksud merupakan barang bekas dengan harga yang relatif murah. Terkait dengan kepemilikan barang dimaksud, sebagian besar mereka telah menggunakan listrik PLN sebagai sarana penerangan dan kegiatan/kemanfaatan lainnya. Dari sisi lain bahwa upaya pemerintah (pusat dan daerah) meluaskan jangkauan kelistrikan di masyarakat sudah cukup berhasil, sudah digunakannya listrik PLN sebagai penerangan dan terkait kegiatan lain yang

menggunakan listrik, khususnya pasca tsunami di Kota Banda Aceh.

Rekomendasi: penelitian ditinjau dari aspek atau kriteria kemiskinan yang ada dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri terkait dengan kemiskinan perlu disesuaikan atau ditinjau kembali dengan kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakat kurang mampu (masyarakat miskin), khusus di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie. Penghasilan perbulan dan kepemilikan barang (yang dahulu merupakan kebutuhan sekunder), telah berubah menjadi kebutuhan primer. Termasuk di dalamnya penggunaan dan pemanfaatan listrik PLN untuk mendukung kegiatan/kemanfaatan listrik lain.

Aspek atau kriteria tersebut perlu ditinjau agar sesuai dengan kenyataan di kehidupan dan penghidupan masyarakat di era sekarang, khususnya di lokasi penelitian ini yaitu Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie dan umumnya di Provinsi Aceh.

Ucapan Terima Kasih

Dengan selesainya tulisan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie, tenaga pengumpul data, aparat pemerintah setempat dan lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah membantu terlaksananya penelitian ini, kami ucapkan terima kasih sehingga hasil penelitian ini dapat tersaji. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

Pustaka Acuan

- Andrea Harsono, (2016). *Pasca 10 Tahun Tsunami, Masyarakat Aceh Kini Berhadapan Dengan Formalisasi Islam*, Voice Of America, Berita/Indonesia.
- Abdul Ghani Salleh, (2005). *Perencanaan Kota Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami*, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang Malaysia, Jurnal Arsitektur "Atrium" Vol. 02.No.01 April 2005.
- Aryo Wicaksono, Moh.Nadlir, (2016). *Jumlah Keluarga Miskin di Indonesia Meningkat Akibat Bencana, Belum Selesai Recovery Mereka Kena Bencana Lagi*, Viva. Co.Id,29 Desember 2016.

-, *Dampak Ekonomi Akibat Bencana Capai Rp.4.96 Triliun Paling Banyak Dialami Gempa Bumi di Aceh Desember ini*, Viva.Co.Id, 29 Desember 2016.
- Brithe Mikkelsen, (2001). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan, Sebuah Buku Pegangan Bagi Para praktisi Lapangan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Biro Pusat Statistik dan Departemen Sosial RI, (2000). *Analisa data makro penyandang masalahkesejahteraan sosial hasil susenas 2000*. Jakarta: BPS RI dan Depsos RI.
- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, (2015). data PMKS dan PSKS Kota Banda Aceh.
- Departemen Sosial, (2006). *Pemetaan kemiskinan Kecamatan di Indonesia tahun 2006*. Jakarta: Badiklit Kesos dan Pusdatin Kesos Depsos RI
- Gunawan Sumodiningrat, (2005). *Strategi Pembangunan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta.
- Istiana Hermawati dkk, (2015). *Proposal Penelitian Pengkajian Konsep dan Indikator kemiskinan*, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Rani Virginia Utami, (2014). *Satu Dekade Tsunami Aceh, Pembangunan Aceh Hanya Unggul Secara Fisik*, CNN Indonesia. (19.12.2014)
- Sunyoto Usman, (2015). *Tanggapan Pakar terhadap Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan*. Kementerian Sosial RI. Yogyakarta: tidak dipublikasikan.
- Mubyarto, (2003). *Penanggulangan kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: artikel dalam jurnal Pemberdayaan Rakyat, tahun ke II no 2, April 2003
- Munandar.S, (1986). *Ilmu Sosial dasar*, Bandung, Eresco.
- Nurina Savitri, (2014). *Satu Dekade Tsunami, Pembangunan Ekonomi Di Aceh Masih Lambat*, Radio Australia (12.12.2014).
- Jawa Post, *Inovasi Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal* (1), 21/03/2015,04.30 WIB.
- Oscar Lewis, Scientific American, Oktober 1966, dikutip dalam Ryan,1976.
- Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang *Kesejahteraan sosial*
- Undang-undang No 13/2011 tentang *Penanganan Fakir Miskin*
- United Nation, (2001). *World development report 2000/2001: Attacking Poverty*. Washington Dc: Oxford University Press.

Publikasi Elektronik :

- Sapariah Saturi, *Melihat Pembangunan Aceh Pasca tsunami*, Desember 28,2014.MONGABAY.CO.ID
- Fajar Weiz, (2011). *Makalah kemiskinan* (Sosiologi), fajarweiz.blogspot.co.id/2011 diunduh tgl 8-04-2016.
- Paulus Wirotomo, (2013). *Konsep Pembangunan Sosial Sudut Pandang Sosiologi*, Paulus Wirotomo.blogspot.co.id (26-10-2013), diunduh 7-04-2016
- Teuku Rahmat Danil Cotseurani, *Seharusnya Pemerintah Aceh Terapkan E-Government dan E-Budgeting*, Kompasiana, diunduh 27-4-2016.
- Voice of America, *Berita Indonesia, Pasca 10 tahun Tsunami, Masyarakat Aceh Kini Berhadapan Dengan Formalisasi Islam*, diunduh 23-03-2016.